

POTENSI PARIWISATA DALAM PERSPEKTIF ENTREPRENEURIAL GOVERNMENT

SYARIFAH MAIHANI

Dosen Administrasi Niaga, Fakultas Ilmu Fisipol, Universitas Al-Muslim, Bireuen
Cutajja@150@gmail.com

ABSTRAK

Pengembangan Potensi Pariwisata dalam Perspektif Reinventing Government. Pariwisata Kabupaten Bireuen mengalami kemajuan signifikan dalam satu dekade terakhir, terutama dalam rangka menyongsong Visit Bireuen Year 2018 Kabupaten Bireuen. Fenomena di sektor pariwisata ini menarik untuk dikaji dalam perspektif entrepreneurial government. Gagasan utama dari konsep ini adalah bagaimana cara mewirauahakan birokrasi agar sektor publik dapat menjalankan roda organisasinya lebih kompetitif serta efektif dan efisien melalui 10 prinsip entrepreneurial government. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode eksploratori dengan lokus Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bireuen. Berdasarkan dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa kesesuaian antara implementasi perspektif Entrepreneurial Government terhadap kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bireuen adalah mencapai tingkat kesesuaian 80%. Tingkat ini diperoleh dari hasil asumsi hitung 10 prinsip yang terdapat dalam Entrepreneurial Government, Disbudpar Kabupaten Bireuen memenuhi 8 prinsip, sedangkan dua prinsip yang lainnya kurang memenuhi.

Kata Kunci: Pengembangan, Potensi Pariwisata, Entrepreneurial Government

PENDAHULUAN

Bireuen adalah salah satu kabupaten yang terdapat di dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang terbentuk pada tahun 2001 dari permekaran kabupaten Aceh Utara. Dengan Luas wilayah 1.901, 21 Km², dengan jumlah Desa sebanyak 552 Desa, yang terbagi kedalam 17 Kecamatan. Jumlah Penduduk pada tahun 2007 sebanyak 400.024 Jiwa (sumber, Bireuen dalam angka 2014).

Adapun kondisi Geografis dan demografi kabupaten Bireuen berbatasan dengan "Sebelah utara berbatasan dengan: Selat Malaka. Sebelah selatan berbatasan dengan: Kabupaten Bener Meriah. Sebelah barat berbatasan dengan: Kabupaten Pidie. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara". Sektor yang menjadi andalan dikabupaten Bireuen adalah Sektor Pertanian, Perikanan, pariwisata, Perdagangan dan Industri.

Dalam rangka menyongsong Visit Bireuen Year 2018 Kabupaten Bireuen memiliki sejumlah potensi wisata terutama wisata sejarah dan lokasi wisata lainnya yang sangat potensial untuk dikembangkan

dengan baik. Disamping itu Kabupaten Bireuen merupakan wilayah yang memiliki potensi objek wisata alam dan budaya dan telah mendapatkan perhatian wisatawan lokal dan nasional yang ditunjang oleh beberapa faktor antara lain: a) keadaan topografis; b) keadaan georafis; c) keadaan sosial budaya; d) iklim, fauna dan kekayaan alam. Potensi yang tersedia itu dapat terus dikembangkan melalui berbagai program pemerintah untuk pengembangan pariwisata.

Pembangunan kepariwisataan pada umumnya diarahkan sebagai sektor andalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan daerah, memberdayakan perekonomian masyarakat, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan pengenalan dan pemasaran produk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan kawasan wisata harus merupakan pengembangan yang terencana secara menyeluruh sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional,

Dari berbagai sektor andalan yang ada di kabupaten Bireuen salah satunya yaitu objek wisata yang terdapat diberbagai tempat diantaranya: Krueng Simpo, Krueng Batee Ilikek, Pantai Kuala Jangka, Pantai Krueng Juli dan Pantai Ujong Blang, Pantai Peuneulet Baroh, Pantai Calok, Pantai Ulee Kareung, PPI Peudada, Pantai Kuala Raja, Cot Panglima, Paya Blang Rheum, Paya Nie, Rumoeh Tgk Di Awe Geutah, Makam Syuhada 8 dan Waduk Paya Laot.

Fokus permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah pengembangan potensi pariwisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bireuen sesuai dengan prinsip *reinveting government*; 2) Bagaimanakah faktor pendorong dan penghambat pengembangan potensi pariwisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bireuen.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini selanjutnya akan menggunakan jenis penelitian kualitatif metode eksploratori. Penelitian eksploratori atau *entrepreneurial research* dalam istilah lama disebut penelitian eksploratif, merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian. Penelitian yang bertujuan menghimpun informasi awal yang akan membantu upaya menetapkan masalah dan merumuskan hipotesis Kotler.

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Analisis data dengan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian ini di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bireuen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi 10 prinsip dalam perspektif *Entrepreneurial Government* di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bireuen.

Entrepreneurial Government merupakan prinsip mewirausahakan birokrasi. Dalam prinsip ini tergantung 10 prinsip yang menjadi acuan. Secara umum konsep ini digambarkan sebagai usaha organisasi pemerintahan yang mengadopsi prinsip bisnis dalam mencapai kinerja layanan. Adapun dari hasil penelitian di lapangan ditemukan data dan fakta terkait implementasi *entrepreneurial government* di Disbudpar Kabupaten Bireuen sebagai berikut:

a. Pemerintahan Katalis

Dalam prinsip ini, Disbudpar Kabupaten Bireuen sudah memiliki kebijakan strategis maupun rencana kegiatan yang ter-susun selama lima tahun yang tertuang dalam renstra. Dalam rencana kegiatan itu, sudah terdapat target selama lima tahun, mengupayakan agar menjadi model pengembangan destinasi pariwisata syariah bagi daerah Aceh khususnya dan daerah lain di Indonesia umumnya realisasi program dan juga rincian dana untuk melakukan suatu program serta kegiatan. Oleh karena itu dalam prinsip pemerintah katalis, Disbudpar sudah menggunakan tugas dan fungsinya untuk membuat kebijakan strategis dengan baik.

b. Pemerintahan Milik Masyarakat

Dalam prinsip ini, Disbudpar Kabupaten Bireuen mempunyai program yang disebut dengan Kelompok Sadar Wisata (KSW). KSW ini yang diharapkan memiliki kontribusi dan aspirasi untuk Disbudpar Kabupaten Bireuen dalam menyusun program ke depan. Masyarakat berusaha dilibatkan dalam penyusunan langkah dan kebijakan yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, Disbudpar Kabupaten Bireuen sudah mengusahakan keperintahannya bersama masyarakat dengan cukup baik melalui program yang sudah dicanangkannya

c. Pemerintahan Kompetitif

Dalam prinsip pemerintahan yang kompetitif, adalah bagaimana Disbudpar

Kabupaten Bireuen mampu berdaya saing dengan pemerintah daerah yang lain untuk pengembangan pariwisata. Hal itu terbukti dengan kunjungan pariwisata Kabupaten Bireuen yang secara kuantitas.

d. Pemerintahan digerakkan Misi

Disbudpar Kabupaten Bireuen memiliki visi dan misi yang jelas untuk menentukan arah kebijakan pengembangan pariwisata Kabupaten Bireuen. Misi tersebut memiliki orientasi jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek yang cukup terarah. Visi misi tersebut tertuang dalam rencana strategis Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu, Disbudpar Kabupaten Bireuen telah memenuhi prinsip yang dinamakan pemerintahan digerakkan oleh misi.

e. Pemerintahan Berorientasi Hasil

Pada prinsip ini, Disbudpar Kabupaten Bireuen berusaha menentukan kebijakan strategis dan melakukan program serta kegiatan yang berlandaskan atas *apa outcome* yang akan diterima. Hal itu terbukti dengan Disbudpar Kabupaten Bireuen yang menerima penghargaan atas jasanya mengelola pariwisata dengan baik. Oleh karena itu, pada prinsip ini, Disbudpar Kabupaten Bireuen telah melakukan proses dan menghasilkan kemanfaatan dengan baik.

f. Pemerintahan Berorientasi Pelanggan

Prinsip pemerintahan berorientasi pada pelanggan ini fokus utamanya adalah kepuasan pengunjung. Dalam hal kepuasan pada pengunjung, Disbudpar Kabupaten Bireuen berupaya untuk melakukan program dan perbaikan sarana prasarana di beberapa objek wisata. Oleh karena itu dalam prinsip ini Disbudpar Kabupaten Bireuen sudah berupaya dan dijalankan dengan baik.

g. Pemerintahan Wirausaha

Pada dasarnya, prinsip ini adalah bagaimana Disbudpar Kabupaten Bireuen mendapatkan keuntungan atau profit dari kebijakan dan program yang sudah dijalankan. Disbudpar Kabupaten Bireuen melakukan sebuah upaya lima tahun terakhir ini melakukan program pengembangan pariwisata yang diharapkan memberikan keuntungan bagi pendapatan asli daerah (PAD). Sehingga, dalam prinsip

ini Disbudpar Kabupaten Bireuen telah melakukan kinerja yang cukup baik karena memiliki kontribusi yang signifikan bagi PAD Kabupaten Bireuen.

h. Pemerintahan Antisipatif

Fokus utama dalam prinsip ini adalah bagaimana kebijakan strategis Disbudpar Kabupaten Bireuen untuk mengatasi hambatan yang akan datang di masa depan. Untuk pengelolaan hambatan pengembangan pariwisata ini, Disbudpar Kabupaten Bireuen sudah memiliki dokumen perencanaan dan penanganan pada hambatan yang sudah dianalisis yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, Disbudpar Kabupaten Bireuen sudah menjalankan prinsip ini dengan cukup baik.

i. Pemerintahan Desentralisasi

Dalam prinsip ini, yang menjadi fokus perhatian adalah penyerahan atau pendistribusian tugas dan wewenang ke pada level pemerintahan yang lebih rendah. Disbudpar Kabupaten Bireuen tidak sepenuhnya memiliki kewenangan pada seluruh objek wisata di Kabupaten Bireuen untuk dikelola. Karena ada beberapa pariwisata yang pengelolaannya masih dalam naungan Pemkab dan swasta. Sementara itu, Disbudpar Kabupaten Bireuen hanya menaungi wisata pantai Kuala Raja dan Pusat Pendaratan Ikan (PPI) Peudada. Oleh karena itu dalam prinsip ini masih belum berjalan dengan baik pada Disbudpar Kabupaten Bireuen.

j. Pemerintahan Berorientasi pada Pasar

Fokus perhatian dalam prinsip ini adalah usaha pemerintah untuk bekerjasama dengan pihak swasta dalam program pengembangan pariwisata di Kabupaten Bireuen. Disbudpar Kabupaten Bireuen menaungi dua pariwisata yakni pantai Kuala Raja dan Pusat Pendaratan Ikan (PPI) Peudada. Namun dalam proses pengembangan itu, Disbudpar Kabupaten Bireuen belum mampu melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk berinvestasi di objek pariwisata yang mereka naungi. Oleh karena itu dalam prinsip ini belum bisa dijalankan dengan baik oleh Disbudpar Kabupaten Bireuen.

Faktor Pendorong dan Penghambat Pengembangan Potensi Pariwisata pada Disbudpar Bireuen

Faktor pendorong dan pengembang dalam pengembangan potensi pariwisata dihadapkan pada dua aspek, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Secara umum, hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata adalah:

- a. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak didukung dengan sumber daya manusia yang ada di Disbudpar Kabupaten Bireuen.
- b. Rendahnya kesadaran masyarakat akan respon wisata sehingga aksesibilitas wisata sangat terlambat.
- c. Sarana Prasarana serta wahana sajian di beberapa objek wisata khususnya masih sangat terbatas (belum memenuhi kebutuhan konsumen wisata).
- d. Keterbatasan anggaran sehingga menyulitkan inovasi pengembangan pariwisata sehingga intensifikasi wahana sajian pada objek wisata tidak dapat dilakukan.
- e. Belum adanya kerjasama Disbudpar Kabupaten Bireuen dengan pihak swasta dalam pengembangan pariwisata yang lebih passif.

Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Ekowisata pada Disbudpar Kabupaten Bireuen

Dalam penelitian ini, konsep *Entrepreneurial Government* menjadi tinjauan utama sejauh mana Disbudpar Kabupaten Bireuen dapat menjalankan tugas dan fungsinya di bidang kepariwisataan. *Entrepreneurial Government* memiliki 10 prinsip yang berusaha melihat kinerja birokrasi dalam hal ini Disbudpar dalam manajemen pariwisata Kabupaten Bireuen. Oleh karena itu, konsep *Entrepreneurial Government* ini hanya sebatas mengakaji pada dimensi pemerintahan yakni Disbudpar Kabupaten Bireuen. Sementara ekowisata adalah strategi pengembangan Pariwisata yang

bersifat makro. Dalam pendekatan ekowisata salah satunya terdapat pendekatan organisasi sektor publik. Mengacu pada hal tersebut maka organisasi sektor publik, Disbudpar, menjadi salah satu penunjang ekowisata yang sangat sentral. Jika organisasi sektor publik dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang pariwisata, maka pariwisata berbasis ekowisata juga akan tercapai dengan baik. Dalam analisis peta potensi ekowisata ini, fokus utama pembahasan akan lebih fokus kepada wisata yang dikelola Disbudpar, yakni Waduk Paya Laot, Karena Waduk Paya Laot.-dang di Peudada memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi ekowisata. Sesuai dengan kondisi di kawasan Waduk Paya Laot. yang merupakan kombinasi daerah darat dan perairan dapat dikembangkan beberapa potensi ekowisata. Potensi ekowisata yang dapat dikembangkan di Waduk Paya Laot.-dang diantaranya: *agroforest*, perikanan, budaya dan edukasi.

SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian, Potensi Pengembangan Pariwisata dalam Perspektif *Entrepreneurial Government* di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bireuen, yang menggunakan metode kualitatif eksploratori dengan analisis data menurut Miles dan Huberman, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kesesuaian antara implementasi perspektif *Entrepreneurial Government* terhadap kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bireuen adalah mencapai tingkat kesesuaian 80 %. Tingkat ini diperoleh dari hasil asumsi hitung 10 prinsip yang terdapat dalam *Entrepreneurial Government*, Disbudpar Kabupaten Bireuen memenuhi 8 prinsip, sedangkan dua prinsip yang lainnya kurang memenuhi. Adapun penjabaran dari hasil kesimpulan tersebut adalah 8 prinsip yang sesuai yakni:
 - a. Pemerintahan Katalis;
 - b. Pemerintahan Milik Masyarakat;
 - c. Pemerintahan Kompetitif;

- d. Pemerintahan digerakkan Misi;
- e. Pemerintahan Berorientasi Hasil;
- f. Pemerintahan Berorientasi Pelanggan;
- g. Pemerintahan Wirausaha;
- h. Pemerintahan Antisipatif.

Sedangkan terdapat dua implementasi prinsip *Entrepreneurial Government* yang belum terpenuhi yakni:

- a. Pemerintahan Desentralisasi;
 - b. Pemerintahan Berorientasi pada Pasar.
2. Sementara faktor pendorong dan penghambat pengembangan potensi pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut:
- a. Faktor pendorong pengembangan potensi pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bireuen:
 - a) Potensi alam Kabupaten Bireuen yang memiliki daya tarik yakni terdiri dari pantai serta bebatuan sehingga ditetapkan sebagai kawasan daerah tujuan wisata;
 - b) Disbudpar memiliki kebijakan strategis yang sangat baik dengan didukung oleh analisis untuk pemecahan masalah yang ada;
 - c) Disbudpar memiliki metode strategi yang sangat komprehensif dalam pengembangan potensi pariwisata, tinggal bagaimana mengelola metode strategi tersebut;
 - d) Program perbaikan sarana prasarana yang diselenggarakan setiap tahun oleh Disbudpar Kabupaten Bireuen;
 - e) Daya tarik wisata Kabupaten Bireuen yang memiliki keanekaragaman dan bisa dikembangkan menjadi kawasan pusat pariwisata sehingga dapat menarik minat investor untuk berinvestasi.
 - b. Faktor penghambat pengembangan potensi pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bireuen:

- a) Kemajuan Iptek dan peradaban dunia, maka nilai luhur seni budaya nasional dan daerah semakin pudar akibat pergeseran pola hidup dan cara berfikir generasi sekarang dan mendatang;
- b) Belum optimalnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam program pengembangan pariwisata di Kabupaten Bireuen;
- c) Belum bisa memaksimalkan peluang untuk menjalin kerjasama dengan kalangan swasta dalam pengembangan semua aspek yang berkaitan dengan budaya dan wisata;
- d) Keterbatasan dana di daerah guna mendukung pembangunan sarana dan prasarana penunjang objek wisata termasuk aktualisasi seni budaya
- e) Minimnya investasi dalam negeri dan asing terhadap pembangunan bidang wisata sehingga pengembangan pariwisata tidak maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirin, Tatang. (2009) *Penelitian Eksploratori* (Eksploratif). Diakses melalui <http://wordpress.com/> [diakses pada tanggal 13 Januari 2012].
- Keban, Yeremias T. (2004) *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta, Gava Media.
- Kurnianto, Imam Rudy. (2008) *Pengembangan Ekowisata (Ecotourism) di Kawasan Waduk Cacaban Kabupaten Tegal*. Semarang, Universitas Diponegoro.
- Osborn, David and Gaebler, Ted. (1996) *Mewirausahakan Birokrasi: Reinventing Government, Mentransformasi Semangat Wirausaha Ke Dalam Sektor Publik*. Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo.
- Spillane, James J. (1994) *Ekonomi Pariwisata: Sejarah dan*

Prospeknya. Yogyakarta, Yoeti, Oka. (1996) *Pemasaran Pariwisata*
Kanisius. *Terpadu.* Bandung, Angkasa.
Undang-undang Republik Indonesia No. 32
Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah.